

uku Referensi: Pendidikan Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi pada Pemilik Industri Kecil di Tulungagung

by Agus Eko S

Submission date: 14-Apr-2023 10:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2064066369

File name: 26_2022_Buku_Referensi_Literasi_keuangan.pdf (1.49M)

Word count: 15278

Character count: 101683



Agus Eko Sujianto &
Adimas Agus Ahmad Asy'arie

Pendidikan Literasi Keuangan & Keputusan
Investasi pada Pemilik Industri Kecil di Tulungagung



Keputusan investasi pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi aspek *financial knowledge*, *financial attitudes* dan *financial behavior*. Meskipun hasilnya tidak signifikan, namun demikian terdapat aspek yang secara empiris memiliki kontribusi positif bagi pelaku UMKM #



ISBN 978-602-85689-89-7

9 786028 569897

Penerbit Cahaya Abadi
ANGGOTA IKAPI NOMOR:
121/JTI/2010

Buku Referensi

**PENDIDIKAN LITERASI
KEUANGAN &**

Keputusan Investasi
pada Pemilik Industri Kecil di
Tulungagung

Agus Eko Sujianto
Adimas Agus Ahmad Asy'arie

**Buku Referensi:
Pendidikan Literasi Keuangan dan
Keputusan Investasi pada Pemilik Industri
Kecil di Tulungagung**



Oleh:
Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, SE., MM
Adimas Agus Ahmad Asy'arie, SE

**PENERBIT CAHAYA ABADI
TULUNGAGUNG
TAHUN 2022**

Buku Referensi: Pendidikan Literasi Keuangan dan Keputusan
Investasi pada Pemilik Industri Kecil di Tulungagung

Oleh:

Agus Eko Sujianto; Adimas Agus Ahmad Asy'arie

*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras
mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi
buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari
Penerbit CAHAYA ABADI.*

Diterbitkan oleh:

Penerbit CAHAYA ABADI

Email: agusekosujianto@gmail.com

Telp. 085234635471

Editor: H. Timbul

Agus Eko Sujianto; Adimas Agus Ahmad Asy'arie

Buku Referensi: Pendidikan Literasi Keuangan dan Keputusan
Investasi pada Pemilik Industri Kecil di Tulungagung / Agus
Eko Sujianto; Adimas Agus Ahmad Asy'arie; editor: H. Timbul
– Tulungagung: Cahaya Abadi, 2022

vi; 103 hlm. ; 14,8 x 21 cm.

ISBN: 978-602-8569-89-7

Cetakan 1, Maret 2022

ANGGOTA IKAPI NOMOR: 121/JTI/2010

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan kekuasaan-Nya naskah buku yang berjudul “Buku Referensi: Pendidikan Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi pada Pemilik Industri Kecil di Tulungagung” ini dapat terselesaikan untuk selanjutnya diajukan dalam pemrosesan ISBN di Jakarta. Buku ini dikembangkan dari hasil penelitian mendalam peneliti yang disusun menjadi dua belas bab yang mengurai tentang pendidikan literasi keuangan dan keputusan investasi baik berdasar teori maupun pengamatan mendalam.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang berpartisipasi dalam penerbitan buku ini yaitu: (1) Rektor UIN SATU Tulungagung; (2) Ketua LP2M UIN SATU Tulungagung; (3) Kepala SPI UIN SATU Tulungagung, dan (4) Sivitas Akademika UIN SATU Tulungagung.

Saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki monograf ini sangat penulis harapkan sebagai salah satu bentuk dinamika keilmuan pada masa-masa yang akan datang.

Tulungagung, Maret 2022
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Daftar Isi	v
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Hakekat Investasi	5
Bab III. Investasi Syariah.....	15
Bab IV. Tujuan dan Keputusan Investasi.....	19
Bab V. Pendidikan Literasi Keuangan	29
Bab VI. Model-model Keputusan Investasi	37
Bab VII. Faktor-Faktor Keputusan Investasi	49
Bab VIII. Financial Knowledge	57
Bab IX. Fiancial Attitudes	59
Bab X. Financial Behavior	63
Bab XI. Penutup	65
Daftar Pustaka	69
Lampiran	79



Bab 1

Pendahuluan

Kasus tentang investasi ilegal atau biasa disebut dengan investasi “bodong” atau investasi “abal-abal” di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan ini tidak saja terkait dengan aspek kuantitas yaitu orang atau nasabah yang menderita kerugian karena dicurangi, namun juga pada aspek kualitas yaitu semakin besarnya nilai uang hasil uang investasi yang berkedok hasil yang berlipat-ganda ini. Ramadhani (2021) melaporkan bahwa dalam satu dekade terakhir, kerugian masyarakat akibat investasi “abal-abal” ini mencapai Rp 117.4 triliun. Sebuah angka yang sangat besar, serta hal ini dapat menggambarkan sikap dan perilaku masyarakat yang masih rendah pengetahuannya tentang financial dan investasi.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan catatan bahwa dengan literasi keuangan dapat mengedukasi masyarakat sejak dini sehingga kerugian yang lebih besar lagi dapat dihindarkan (Firdausi, 2018). Literasi keuangan ini juga perlu diterapkan

pada generasi muda yaitu pelajar dan mahasiswa (Safitri & Niurmiaswari, 2019). Sedangkan Arianti & Azzahra (2020) dalam penelitiannya menemukan, jika pengalaman kerja, tingkat pendidikan, perilaku keuangan, investasi dan pendapatan tinggi maka tingkat literasi keuangan masyarakat juga tinggi karena pola hubungannya positif.

Penelitian ini secara umum ingin menguji antara lain temuan Arianti & Azzahra (2020) dengan mengambil lokus penelitian yang berbeda yaitu pemilik industri kecil di Tulungagung. Sedangkan literasi keuangan dijabarkan menjadi tiga aspek yaitu: pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), sikap keuangan (*financial attitudes*) dan perilaku keuangan (*financial behavior*).

Keputusan Investasi, yaitu kebijakan dan atau kebijaksanaan perusahaan dan atau seseorang dalam mengalokasikan dana perusahaan dan atau pribadinya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dengan meminimalisir risiko yang dinikmati di kemudian hari (Virlics, 2013; Widiarti, 2018). Keputusan investasi dalam buku ini dapat dijelaskan dengan indikator penelitian berikut ini yaitu: pengetahuan tentang risiko, keuntungan, ketersediaan modal, rekomendasi pakar, kondisi ekonomi, akses keuangan dan teknologi.

Pengetahuan Keuangan, yaitu penguasaan terhadap aspek-aspek keuangan dan keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu keuangan (Kholilah & Iramani, 2013). Pengetahuan keuangan dalam buku ini dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu pemahaman tentang istilah laporan keuangan (pendapatan, biaya kesehatan, biaya pendidikan, pajak, zakat, asuransi, keuntungan), inflasi, bunga majemuk, tabungan, investasi dan pemahaman mengenai pinjaman.

Sikap Keuangan, yaitu perasaan seseorang tentang keuangan (Herdjiono & Damanik, 2016). Sikap keuangan dalam buku ini dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu rencana pinjaman ke bank, kajian tentang profitabilitas, tentang arus kas dan tentang rencana bisnis.

Perilaku Keuangan, yaitu tingkah laku seseorang terhadap aspek-aspek keuangan (Nofsinger, 2001). Perilaku Keuangan. Perilaku keuangan dalam buku ini dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu rencana pinjaman ke bank, kajian tentang profitabilitas, tentang arus kas dan tentang rencana bisnis.



Bab 2

Hakekat Investasi

Herlianto (2013) mendefinisikan bahwa investasi merupakan penanaman modal atau dana untuk menghasilkan kekayaan, yang dapat memberikan keuntungan tingkat pengembalian (*return*) baik pada masa sekarang atau dan di masa depan. Pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi pada asset riil (*real assets*) dan investasi pada asset finansial (*financial assets*). Investasi pada asset riil antara lain dapat berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada asset finansial antara lain dapat berupa saham dan obligasi.

Sedangkan Pratomo & Nugraha (2001) menjelaskan bahwa investasi pada dasarnya membeli suatu asset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Namun demikian, investasi dapat dipotret dari aspek keuangan (*financial investment*) dan non keuangan seperti pendidikan. Dengan demikian investasi perlu perencanaan untuk

kebutuhan apa dana yang akan diinvestasikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, instrument investasi apa yang akan dipilih, bagaimana mengalokasikan dana pada masing-masing instrument, bagaimana melaksanakan atau melakukan implementasinya, bagaimana melakukan evaluasi, dan jika terdapat perubahan-perubahan, langkah penyesuaian apa yang perlu dilakukan.

Investasi juga dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu: pengeluaran atau pengorbanan sumber daya pada saat sekarang yang bersifat pasti, ketidakpastian mengenai risiko (hasil), dan pengembalian di masa datang atau ketidakpastian hasil. Dimana pengeluaran atau pengorbanan dalam investasi merupakan pengorbanan sumber daya yang bersifat *tangible assets* misalnya dana dan properti, maupun *intangible assets* seperti tenaga dan pikiran. Semua bentuk investasi mengandung risiko atau ketidakpastian hasil, yang disebabkan oleh ketidakpastian waktu dan besarnya *return* yang akan diterima investor (Nafik, 2009). Lebih jauh dijelaskan bahwa *tangible assets* disebut juga dengan aset berwujud misalnya dalam bentuk uang tunai, persediaan, kendaraan, peralatan, bangunan dan investasi. *Intangible assets* atau aset tidak berwujud tentunya merupakan aset tidak dalam bentuk fisik dan mencakup hal-hal seperti piutang, pembayaran di muka, paten dan *goodwill*.

Berdasar pendapat Herlianto (2013); Nafik (2009); Pratomo & Nugraha (2001) dapat dijelaskan bahwa keputusan investasi oleh investor dapat berupa investasi untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya finansial misalnya investasi pada pasar modal yaitu saham, obligasi, reksadana dan lain sebagainya. Kemudian juga investasi non finansial misalnya investasi pendidikan dan asset-asset tetap contohnya tanah, mesin produksi, property dan lain sebagainya. Asset disebut juga dengan aktiva yang dapat mencerminkan total kekayaan yang dimiliki oleh individu (perusahaan maupun perseorangan). Asset juga berarti faktor-faktor ekonomi atau sumber-sumber ekonomi yang diharapkan memiliki nilai tambah sekarang dan yang akan datang.

Menurut Nafik (2009) asset adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan. Bahkan lebih teknis lagi Hariyanto (1988); Nafik (2009) secara detail mengemukakan bahwa asset atau aktiva menunjukkan tentang jumlah harta yang dimiliki perusahaan. Asset merupakan barang-barang dan hak-hak yang dimiliki perusahaan yang didalamnya termasuk juga biaya-biaya yang belum dibebankan dalam periode tertentu, tetapi akan dibebankan pada periode yang akan datang. Asset perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) harta lancar (*current assets*); (2) investasi jangka panjang (*long term investment*); (3)

harta tetap (*fixed assets*) dan (4) harta tak berwujud (*intangible assets*).

Pertama, Harta lancar. Merupakan uang kas atau harta lain yang mempunyai kemungkinan yang beralasan untuk dapat dicairkan dalam bentuk kas atau digunakan dalam masa perputaran usaha (siklus akuntansi) yang normal atau satu tahun. Harta lancar diturunkan menjadi delapan yaitu: kas, surat-surat berharga, piutang dagang, wesel tagih, penghasilan yang akan diterima, biaya yang dibayar di muka, persediaan dan *inventory of supplies*.

Kas merupakan semua mata uang dalam negeri dan luar negeri, baik uang logam maupun uang kertas, serta semua surat-surat yang mempunyai sifat seperti mata uang, yaitu sifat yang dapat segera digunakan untuk melakukan pembayaran contohnya cek, wesel pos dan tabungan di bank. Semua surat-surat berharga (saham dan obligasi) yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan tujuan tidak untuk dimiliki dalam jangka Panjang, melainkan akan diperjualbelikan dalam jangka pendek, biasanya dengan mengingat perbedaan tinggi rendahnya *kurs*. Piutang dagang adalah hak atau tagihan perusahaan kepada pihak lain yang akan dimintakan pembayarannya atau pelunasannya bilamana telah sampai pada saat jatuh temponya. Wesel tagih merupakan hak atau tagihan perusahaan kepada

pihak lain yang akan dimintakan pembayarannya atau pelunasannya apabila telah sampai jatuh tempo.

Penghasilan yang akan diterima (*accruals receivable*) merupakan kontra prestasi atas jasa-jasa perusahaan kepada pihak lain yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan yang dapat ditagih dalam waktu satu tahun. Contoh dari asset jenis ini yaitu: piutang bunga/bunga yang akan diterima, piutang komisi/komisi yang masih akan diterima serta piutang sewa/sewa yang masih akan diterima.

Biaya dibayar di muka (*prepaid expenses*) yaitu kontra prestasi atas jasa-jasa pihak lain kepada perusahaan yang sebenarnya belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayar, tetapi sudah dibayar sehingga merupakan suatu titipan uang muka. Misalnya: persekot bunga, persekot sewa dan persekot komisi. Kemudian persediaan, adalah semua persediaan barang yang dipergunakan untuk menjalankan usaha. Contoh persediaan ini yaitu: persediaan bahan mentah, persediaan bahan pembantu, persediaan barang yang sedang diproses serta persediaan barang jadi. Sedangkan *inventory of supplies* yaitu persediaan kebutuhan-kebutuhan yang ringan-ringan dan relative bernilai murah.

Kedua, investasi jangka panjang. Yaitu penanaman modal untuk harta dengan tujuan tidak untuk dipergunakan waktu sekarang, melainkan untuk dipergunakan di waktu yang akan datang. Contoh jenis investasi ini yaitu: investasi dalam bentuk dana, penanaman modal dalam obligasi, serta penanaman modal dalam saham. Ketiga, harta tetap (*fixed assets*). Harta tetap yaitu harta berwujud yang digunakan dalam perusahaan secara permanen.

Harta tetap bisa dalam bentuk tanah yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk usaha perusahaan pada waktu sekarang. Contoh dari harta tetap ini yaitu: tanah, bangunan, peralatan ruangan, kendaraan, mesin-mesin dan alat-alat. Yang dimaksud tanah (*land*) yaitu tempat berdirinya bangunan perusahaan. Bangunan (*building*) yaitu gedung-gedung perusahaan yang dipergunakan untuk usaha. Peralatan ruangan (*furniture and fixture*) yaitu peralatan ruangan yang dipergunakan untuk usaha misalnya meja, kursi, almari, komputer dan lain-lainnya. Kendaraan (*motor equipment*), yaitu peralatan pengangkutan yang dimiliki perusahaan dan dipergunakan untuk jalannya perusahaan. Mesin-mesin yaitu peralatan utama perusahaan untuk menjalankan proses produksi. Alat-alat (*tools*), yaitu peralatan lain yang juga digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Keempat, harta tak berwujud (*intangible assets*). Asset jenis ini bersifat abstrak atau immaterial yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Yang termasuk pada asset tak berwujud ini yaitu: hak *patent*, hak *copyright*, hak *trade mark*, *goodwill*, dan *organization cost*. Hak *patent* adalah hak cipta atas suatu penemuan atau ciptaan suatu barang yang diberikan oleh pemerintah berikut perlindungan dari peniruan dan pemalsuan dari pihak lain. Hak *copyright* yaitu hak cipta atas naskah, karangan yang diberikan pemerintah lengkap dengan perlindungan terhadap peniruan atau pemalsuan dari pihak lain. Hak *trade mark* merupakan hak cipta atas suatu simbol atau tanda atau merk usaha yang diberikan pemerintah dengan perlindungan yang melekat terhadap merk dagang ini dari peniruan atau pemalsuan dari pihak lain. *Goodwill* merupakan keistimewaan yang dimiliki suatu perusahaan dan tidak dimiliki oleh perusahaan pesaingnya misalnya lokasi perusahaan yang strategis, manajemen yang berkualitas dan tenaga kerja yang memiliki etos kerja tinggi. Sedangkan *organization cost* yaitu semua biaya yang dikeluarkan perusahaan di awal perusahaan itu didirikan misalnya biaya perijinan, biaya survey atau studi kelayakan bisnis, dan biaya-biaya untuk keperluan pertemuan-pertemuan yang membahas pendirian perusahaan.

Menurut konsep makroekonomi investasi merupakan komponen pembelanjaan yang besar dan mudah berubah, investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis. Selain itu investasi mengarah pada akumulasi modal. Tambahan atas saham bangunan dan peralatan meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Samuelson & Nordhaus, 2004).

Pendapat di atas secara jelas mengungkapkan bahwa investasi diarahkan untuk pemupukan modal yang dapat dinikmati dalam jangka panjang, sehingga menjadi pandangan yang tidak benar jika suatu investasi merupakan kegiatan ekonomi yang diharapkan kembalinya atau hasilnya dalam jangka pendek. Contohnya investasi-investasi yang menawarkan pengembalian dalam jangka pendek dan hasil yang besar bisa dicurigai bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan investasi bodong yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan.

Investasi tidak saja dinikmati oleh investor, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian suatu negara. Bahkan investasi dapat mendorong kenaikan pendapatan nasional suatu negara yang ditunjukkan dengan persamaan berikut ini.

$$GDP = C + I + G + X - M \dots\dots\dots (Curtis \& Irvine, 2017)$$

$$Y = C + I + G + NX \dots\dots\dots (Mankiw, 2018)$$

Dimana:

GDP = Y: Pendapatan Nasional;

C: Konsumsi Rumah Tangga;

I: Investasi Perusahaan;

G: Peneluaran Pemerintah;

X: Ekspor;

M: Impor;

NX: Ekspor Netto = $X - M$.

Disamping mendorong peningkatan pendapatan nasional, investasi yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan baru akan mendorong penyerapan tenaga kerja sehingga pengangguran dapat dihindarkan, distribusi pendapatan akan meningkat karena pendapatan masyarakat meningkat, tabungan akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Inilah kontribusi positif investasi terhadap perekonomian makro suatu negara. Sehingga tidak heran, pemerintah selalu mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui jalur investasi ini.



Bab 3

Investasi Syariah

Pembahasan mengenai investasi sebagaimana disebutkan di atas masih tergolong dalam investasi yang diarahkan untuk mencapai kepentingan-kepentingan atau keuntungan duniawi yang berarti masih relatif dalam jangka pendek. Sedangkan menurut Islam, investasi dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, yang memperhatikan aspek dunia dan akhirat sehingga tercipta keseimbangan. Keseimbangan inilah yang menjadi esensi lahirnya investasi. Investasi tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun investasi juga memperhatikan orang lain sehingga tercipta kesejahteraan dan keuntungan secara merata. Sementara itu dalam investasi klasik lebih menguntungkan kemanfaatan atau keuntungan dari satu sisi yaitu investor.

Nafik (2009) mengemukakan bahwa Islam memadukan antara dimensi dunia dan akhirat. Setelah kehidupan dunia yang fana, ada kehidupan akhirat yang abadi. Setiap muslim harus berupaya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kehidupan

dunia hanyalah sarana dan masa yang harus dilewati untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. Toha et al., (2020) mengemukakan bahwa menurut syariah, investasi merupakan aktivitas bisnis yang berprinsip pada transaksi yang bebas *riba*, *maisir* dan *gharar*. Sedangkan Abdalloh (2018) menjelaskan, bahwa prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal yang sesuai syariah.

Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI disebutkan bahwa:

Maisir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan; *Gharar* adalah ketidakpastian/ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya; *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (DSN-MUI, 2012).

Menurut Abdalloh (2018), yang dimaksud dengan *riba* yaitu kelebihan tambahan, kenaikan, atau pertumbuhan. Meskipun demikian tidak semua kelebihan, tambahan, kenaikan maupun pertumbuhan dilarang oleh Islam atau termasuk ke dalam *riba*. Mayoritas ulama mendefinisikan *riba* sebagai suatu tambahan (harta) yang dipertukarkan (ditransaksikan), baik

terjadi pada perjanjian (akad) pertama maupun pada saat perubahan (adendum) perjanjian. Tambahan tersebut adalah janji yang besaran atau persentasenya dipersyaratkan pada saat awal transaksi.

Maisir masih menurut Abdalloh (2018) diartikan sebagai untung-untungan, manipulasi, atau penipuan. *Maisir* bukan hanya judi, tetapi mempunyai definisi yang lebih luas, sedangkan judi pasti termasuk *maisir*. *Gharar* adalah ketidakpastian, ketidakjelasan atau ambiguitas. *Gharar* sebagai risiko investasi akan selalu ada dalam setiap transaksi saham di pasar modal. Namun demikian jumhur ulama sepakat bahwa *gharar* dapat diklasifikasi ke dalam yang diperbolehkan sampai dengan yang diharamkan, yaitu *gharar yasir* (*gharar* yang diperbolehkan), *gharar mutawassit* dan *gharar fahish* (*gharar* yang haram).



Bab 4

Tujuan dan Keputusan Investasi

Menurut Nafik (2009) bahwa seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, misalnya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung untuk mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pension, untuk kepentingan spekulasi dan lain sebagainya. Samuelson & Nordhaus (2004) dalam literatur “ilmu makroekonomi” menjelaskan bahwa keinginan masyarakat atau calon investor untuk melakukan investasi ditentukan oleh beberapa hal yaitu: biaya, ekspektasi dan *revenue* (hasil).

Biaya merupakan komponen penting dalam suatu investasi karena terkait dengan pengeluaran perusahaan dalam proses produksinya. Semakin tinggi pengeluaran atau biaya produksi sudah barang tentu berdampak terhadap keuntungan. Biaya dalam konteks ekonomi dibedakan menjadi biaya tetap

dan biaya variabel. Dimana biaya tetap yaitu besarnya pengeluaran perusahaan yang tidak ditentukan oleh besarnya kuantitas. Jadi biaya tetap ini harus dikeluarkan oleh perusahaan meskipun belum menghasilkan output, contohnya: biaya pembelian tanah, biaya pembangunan pabrik, biaya peralatan utama misalnya mesin dan lain sebagainya. Sedangkan biaya variabel merupakan besarnya pengeluaran perusahaan yang rupiahnya ditentukan oleh besar kecilnya output perusahaan. Semakin tinggi output maka secara ekonomi akan meningkatkan biaya variabel ini.

Yang dimaksud dengan ekspektasi yaitu harapan investor terhadap investasi yang dilakukan. Contoh sederhana ekspektasi ini yaitu keuntungan. Jika investor berharap bahwa dalam jangka panjang perusahaan yang didirikannya menghasilkan keuntungan, maka dapat memoyivasi dirinya untuk komitmen dalam bersungguh-sungguh dalam melakukan investasi.

Herlianto (2013) menjelaskan bahwa secara lebih khusus alasan seseorang melakukan investasi karena faktor umum dan faktor khusus. Faktor khususnya yaitu: (1) untuk mendapatkan kehidupan layak di masa datang. Orang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu untuk mempertahankan tingkat pendapatannya sekarang agar tidak berkurang di masa mendatang; (2) untuk mengurangi

tekanan inflasi. Dimana dengan melakukan investasi seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi serta (3) dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa mendorong tumbuhnya investasi melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi.

Sedangkan faktor umumnya menurut Herlianto (2013) yaitu: (1) untuk memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode misalnya bunga, royalti, deviden, uang sewa dan sebagainya; (2) untuk membentuk dana khusus dalam rangka ekspansi dan kepentingan-kepentingan sosial lainnya; (3) untuk mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian ekuitas perusahaan lain; (4) untuk menjamin ketersediaan bahan baku sehingga diperoleh pasar terhadap hasil produksinya; (5) untuk mengurangi persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis di kelasnya dan (6) untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Pada sektor reksa dana, investasi diarahkan untuk beberapa hal berikut ini: menjaga nilai atau perlindungan kapital, untuk memperoleh pendapatan tetap yang relatif stabil, untuk kepentingan kenaikan nilai yang signifikan atas bunga deposito (pertumbuhan jangka panjang). Dengan demikian, tujuan berinvestasi yaitu untuk mempersiapkan masa depan

sedini mungkin melalui perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Adanya perencanaan investasi jauh lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali (Pratomo & Nugraha, 2001).

Sedangkan untuk investasi saham syariah, investor membuat keputusan dengan memilih jenis saham ini didasarkan pada tujuan untuk mencari keuntungan investasi (*return on investment*) dengan metode atau cara yang memenuhi prinsip Islam. Metode analisis yang dilakukan investor syariah baik analisis fundamental maupun analisis teknikal. Kedua analisis ini menjadi alat bantu investasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan investasi saham. Tujuan lainnya yaitu untuk mengurangi risiko kerugian investasi saham (Abdalloh, 2018).

Nafik (2009) mengemukakan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk meraih kesuksesan dan berupaya meningkatkan hasil investasi. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan investasi yang tidak menguntungkan. Bahkan Islam memandang bahwa semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang akan mendapatkan hasil. Sedangkan investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal, begitu pula investasi yang sesuai dengan syariah

dalam rangka ibadah kehadiran Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat secara menyeluruh (*Kâffah*).

Keputusan yang diambil oleh masyarakat untuk melakukan investasi lebih didasarkan pada aspek keuangan misalnya nilai perusahaan atau *price ratios to book value* (PBV). Sumarau (2019) menjelaskan bahwa PBV yang tinggi akan membuat investor yakin akan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rasio PBV sangat penting bagi investor dan calon investor untuk menentukan keputusan investasi. Menurut Suhendah & Nathania (2020), dalam melakukan investasi perusahaan harus mengalokasikan dananya secara bijaksana dan efisien. Hal itu menjadi hal yang mutlak dilakukan ketika mereka mengambil keputusan investasi.

Berdasar pendapat di atas investasi merupakan penempatan dana yang dilakukan oleh investor pada kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis. Oleh karena dalam investasi ini sangat terkait dengan modal dalam bentuk uang maka investor harus melakukan pertimbangan-pertimbangan finansial sebelum keputusan investasi diambil. Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi penting untuk menghindari risiko yaitu kerugian di masa mendatang, atau paling tidak meminimalisir risiko bisnis.

Sedangkan faktor-faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi atau menempatkan sejumlah dananya pada sektor-sektor pilihan secara umum didasarkan pada aspek finansial dan non-finansial sebagaimana dijelaskan oleh peneliti-peneliti relevan berikut ini:

1. Gill et al., (2018) menemukan bahwa aspek risiko dan keuntungan menjadi variabel penting dalam melakukan investasi.
2. Sharma & Sharma (2014) menjelaskan bahwa tren pasar, profitabilitas investasi, pengalaman masa lalu, jumlah modal investasi, toleransi risiko, rekomendasi advokat, informasi akuntansi dan kondisi ekonomi sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Amuko (2015) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan investasi sektor UKM dipengaruhi oleh akses keuangan, biaya dana, pengetahuan tentang risiko.
4. Zhao & Zhang (2019) menjelaskan bahwa faktor teknologi yang mendasari masyarakat melakukan investasi.
5. Gveroski & Jankuloska (2019) sangat optimis bahwa pengambilan keputusan investasi didasarkan pada aspek keuangan.

6. Steinerowska-Streb & Steiner (2014) menjelaskan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh akses ke sumber pendanaan eksternal.

Menurut Anoraga dan Pakarti (2008) keputusan seseorang untuk melakukan investasi tidak terlepas dari faktor informasi. Khusus pada investasi di pasar modal, informasi sangat menentukan mengingat perdagangan di pasar modal bersifat abstrak. Oleh karenanya investasi pada sektor ini memerlukan strategi dan analisis mendalam sebelum investasi diputuskan untuk menghindari risiko bisnis yang meliputi:

1. Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan pendekatan holistik untuk mempelajari bisnis. Sebab ketika seorang investor ingin berinvestasi dalam bisnis untuk jangka panjang (misalnya 3–5 tahun), menjadi sangat penting untuk memahami bisnis dari berbagai perspektif.

2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal digunakan oleh masyarakat untuk menganalisis perusahaan berdasar data masa lampau (*time series*) yang disederhanakan dalam bentuk grafik. Selain metode grafik, metode matematika atau ekonometrika juga lazim digunakan oleh masyarakat untuk menilai perusahaan,

sehingga diperoleh informasi yang akurat untuk melakukan keputusan investasi.

3. Analisis Ekonomi

Analisis lainnya yang sangat penting dalam menentukan keputusan investasi yaitu kondisi makro ekonomi. Kondisi ekonomi yang dimaksud misalnya: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, pendapatan per kapita, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung dapat meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan investasi, sementara pengangguran yang tinggi akan mendorong minat masyarakat dalam investasi mengingat keterbatasan pendapatan. Kemudian inflasi yang rendah berdampak pada peningkatan minat investasi karena masyarakat memiliki permintaan potensial. Demikian halnya dengan pendapatan per kapita, dimana peningkatan variabel ini dapat mendorong terjadinya peningkatan masyarakat terhadap kegiatan investasi.

4. Analisis Rasio Keuangan

Rasio-rasio keuangan berperan paling penting untuk menentukan keputusan investasi, baik dalam hal likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas dan rasio pasar.

Rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka

pendeknya dengan menggunakan: *net-working capital*, *quick ratio* dan *current ratio*.

Penilaian terhadap rasio solvabilitas sangat penting bagi perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan dalam jangka panjang. Rasio yang lazim digunakan yaitu: *cash return on sales*, *cash flow to net income*, *cash flow interest coverage*, *times interest earned*, *long-term debt to capitalization ratio*, *long-term debt to equity ratio*, *debt to equity ratio* dan *debt ratio*.

Rasio aktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan harta kekayaannya. Misalnya: *day's sales in inventory*, *average collection period*, *inventory turnover*, *account receivable turnover*, *fixed asset turnover* dan *total asset turnover*.

Rasio rentabilitas, digunakan perusahaan untuk mengkalkulasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio yang digunakan yaitu: *operating ratio*, *return on equity*, *operating return on asset*, *net profit margin* dan *gross profit margin*.

Rasio pasar, digunakan untuk menilai informasi penting bagi suatu perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham, misalnya dengan menggunakan alat analisis yaitu: *price to*

book value, book value per share, price earning ratio, dividend payout ratio, earning per share, dividend per share dan dividend yield.

Mempertimbangkan teori tentang investasi, keputusan investasi, serta penelitian tentang keputusan investasi, maka keputusan investasi dalam studi ini dapat dijelaskan dengan indikator penelitian berikut ini yaitu: pengetahuan tentang risiko, keuntungan, ketersediaan modal, rekomendasi pakar, kondisi ekonomi, akses keuangan dan teknologi. Ketujuh indikator ini kemudian diturunkan menjadi instrument yang sekaligus menjadi alat untuk mengumpulkan data penelitian menggunakan angket atau questioner yang didistribusikan kepada responden penelitian ini yaitu pelaku usaha di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.



Bab 5

Pendidikan Literasi Keuangan

Pada abad 21 ini, literasi keuangan menjadi aspek penting untuk diimplementasikan kepada masyarakat Indonesia sejak dini karena memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengelola keuangannya. Bahkan literasi keuangan ini diperlukan sejak dini dan terintegrasi dengan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Namun demikian pendidikan literasi keuangan ini tidak hanya sekedar pengenalan terhadap uang sebagai alat bayar atau alat transaksi, tetapi yang lebih penting yaitu manajemen uang.

Yang dimaksud manajemen uang disini yaitu kemampuan dalam mengalokasikan sejumlah uang untuk kepentingan-kepentingan konsumsi dan investasi sehingga lahir yang namanya skala prioritas (Ariyani, 2018). Berdasar narasi di atas bahwa literasi itu tidak sekedar baca tulis hitung tetapi juga

terkait dengan kemampuan personal dalam mengelola keuangan pribadi untuk mencapai kesejahteraan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya.

Pendidikan literasi keuangan yang diterapkan sejak dini pada tingkat sekolah dasar dapat membekali siswa dengan pengetahuan tentang perencanaan, pemahaman, pengaplikasian dan pengelolaan keuangan untuk membuat keputusan terbaik tentang keuangannya. Contoh bentuk konkrit dari pendidikan literasi keuangan di sekolah dasar ini yaitu dalam bentuk kegiatan menabung yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan ekonomi atau Ilmu Pengetahuan Sosial, dimana siswa diajarkan untuk memahami tentang faktor-faktor ekonomi salah satu diantaranya yaitu uang (Laila et al., 2019).

Pendidikan literasi keuangan sejak usia sekolah dasar ini disamping juga untuk membudayakan literasi keuangan pada siswa juga untuk menanamkan nilai-nilai literasi keuangan sejak dini sebagaimana studi (Rapih, 2016) bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam literasi keuangan dapat dipahami oleh peserta didik jika diperkuat oleh peran keluarga. Jadi tidak hanya pendidikan di dalam kelas atau sekolah saja yang berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan siswa tetapi peran keluarga sebagai sarana pendidikan informal juga sangat

menentukan. Nilai-nilai pendidikan literasi keuangan yang dimaksud yaitu:

1. Partisipasi anak atau peserta didik pada pengambilan keputusan;

Terkait proses pengambilan keputusan, anak selalu dilibatkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab penggunaan uang. Rasa tanggung jawab ini dapat dibangun sedini mungkin sehingga tanggung jawab terpupuk sejak usia dini.

2. Pendidikan untuk menanamkan skala prioritas dengan memberikan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan;

Kebiasaan hidup konsumtif dapat diminimalisir dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang skala prioritas dalam membelanjakan sejumlah uang. Uang atau dana merupakan sumber ekonomi yang cara memperolehnya tentu dengan pengorbanan sumber daya lainnya. Oleh karenanya, pembelanjaan uang harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan skala prioritas masing-masing individu.

3. Budaya menabung;

Tidak semua investor untuk melakukan investasi atau bahkan perluasan usaha menggunakan modal sendiri, atau

dengan kata lain bahwa investasi banyak didanai oleh pendanaan dari luar perusahaan misalnya perbankan. Sedangkan perbankan memperoleh dana salah satu diantaranya dari partisipasi anggota masyarakat atau nasabah yang menabung atau menyimpan dananya di bank dengan pertimbangan investasi. Kegiatan menabung ini tentu akan membantu berkembangnya kegiatan bisnis sector riil yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Pengenalan terhadap lembaga-lembaga finansial baik dalam bentuk bank dan nonbank;

Lembaga keuangan dapat berbentuk bank maupun non bank misalnya pegadaian dan asuransi. Ketika masyarakat sejak dini sudah mengenal lembaga-lembaga keuangan yang eksis di Indonesia maka pada saat dewasa bisa berinteraksi bahkan sebagai pelaku bisnis di bidang perbankan, pegadaian, asuransi dan lain sebagainya. Jadi tidak saja menjadi nasabah atau konsumen, namun dengan pengetahuan yang cukup mereka bisa menjadi produsen atau praktisi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di Indonesia.

Dalam konteks implementasi dari literasi keuangan, bahwa sektor keuangan yang stabil pada suatu negara dapat

tercermin dari nilai tingkat literasi masyarakat dalam kaitannya dengan layanan sektor keuangan baik bank maupun nonbank. Bahkan Sari (2018) menjelaskan bahwa sector keuangan yang stabil dapat diukur dengan tingkat literasi keuangan di bawah 30%. Sedangkan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat ini dapat mencerminkan pola hidup boros sehingga perlu upaya yang sistemik untuk mengurangi pola hidup konsumtif atau boros yaitu dengan:

1. Pendidikan literasi keuangan secara mobile;

Upaya mensosialisasikan literasi keuangan dapat dilaksanakan secara baik dengan mengintegrasikan cara-cara konvensional dan dapat dilaksanakan secara mobile yang memanfaatkan teknologi informasi.

2. Mensimulasikan produk-produk perbankan;

Simulasi terhadap produk-produk perbankan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk lebih mendekatkan diri terhadap *stakeholders* yaitu masyarakat pengguna layanan perbankan.

3. Kurikulum pendidikan pada lembaga pendidikan yang mengakomodasi literasi keuangan;

Program-program seperti "*financial literacy goes to campus*" merupakan sarana untuk merekatkan hubungan lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan dengan

lembaga pendidikan melalui kurikulum pendidikan berbasis literasi keuangan.

4. Pendampingan literasi keuangan pada lembaga pendidikan; Kesuksesan pelaksanaan literasi keuangan bukan saja tanggung jawab pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau Bank Indonesia (BI), tetapi juga menjadi kewajiban lembaga pendidikan untuk terus mensosialisasikan dan mengajarkan literasi keuangan di lingkungan sekolahnya. Bahkan, pendidikan literasi keuangan ini tidak saja terintegrasi dengan kurikulum di pendidikan tinggi, tetapi lembaga pendidikan pada tingkat dasar atau sekolah dasar saat ini juga mengadopsi Pendidikan literasi keuangan. Oleh karenanya diperlukan pendampingan kepada lembaga-lembaga pendidikan ini supaya terdapat kesamaan pemahaman tentang literasi keuangan. Bentuk pendampingan misalnya pembuatan kurikulum dan silabus tentang pendidikan literasi keuangan yang sesuai dengan level pendidikannya.
5. Mengintegrasikan literasi keuangan pada kegiatan pengabdian masyarakat; Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tugas dan kewajiban sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis literasi keuangan menjadi sangat penting untuk diimplementasikan sebagai embrio lahirnya karya-karya monumental dosen dan mahasiswa yang tidak saja berbasis hasil penelitian, tetapi juga berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. Pembuatan gerai atau pojok OJK pada lembaga pendidikan tinggi.

Saat ini sering dijumpai BI Corner atau juga Pojok Bursa Efek Indonesia di kampus-kampus atau perguruan tinggi. Pendirian ini sebagai tindak lanjut kerjasama lintas sektor kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Namun demikian dalam rangka untuk meng-edukasi masyarakat dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk bank maupun nonbank, OJK dirasa perlu untuk bekerjasama dengan pendidikan tinggi melalui gerai OJK untuk merespon kebutuhan informasi dan pengetahuan lainnya dari sivitas akademika perguruan tinggi.



Bab 6

Model-model Keputusan Investasi

Saat ini terjadi pergeseran paradigma khususnya bagi golongan menengah ke atas, dimana porsi investasi mengalami peningkatan dibanding porsi untuk konsumsi. Hal ini berbeda dengan masyarakat golongan bawah, dimana mereka cenderung untuk meningkatkan konsumsi dibanding investasi. Konsumsi merupakan kebutuhan primer yang sudah barang tentu menjadi kekuatan golongan ekonomi kelas bawah. Sedangkan investasi merupakan kebutuhan sekunder dan jika ditinjau dari sudut pandang masyarakat umum ini relatif dekat dengan kebutuhan masyarakat golongan menengah ke atas. Namun demikian tidak jarang dijumpai, banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang terjebak oleh investasi “abal-abal” atau investasi bodong yang tentunya merugikan masyarakat investor (H et al., 2020).

Seorang investor selalu dihadapkan pada situasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajerial, sehingga diperlukan informasi yang lengkap dan akurat sebelum keputusan dibuat untuk menghindari risiko (Virlics, 2013). Apalagi pengambilan keputusan investasi tentang sejumlah dana yang diharapkan menghasilkan keuntungan pada masa depan, maka diperlukan pertimbangan financial terutama terkait tingkat pengembalian modal (Douglas, 1987). Pertimbangan financial tersebut antara lain faktor manajemen risiko, dan ini penting untuk mengantisipasi kerugian dalam berbisnis. Penelitian Falkner & Hiebl (2015); Ludmila et al. (2017); Wüstermann (2016) menjelaskan bahwa sektor SMEs berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian berkelanjutan dan sama pentingnya dengan perusahaan besar. Bahkan, sektor SMEs sangat berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena terdapat unsur risiko dan keterbatasan keuangan. Namun demikian dalam berbisnis bukan tanpa risiko, SMEs memerlukan manajemen risiko untuk mendukung strategi bisnisnya.

Risiko bisnis dan keuntungan merupakan dua aspek penting dalam dunia investasi (Gill et al., 2018; Sharma & Sharma, 2014). Sedangkan penelitian Tworek (2013) bahwa pengetahuan tentang metode keuangan sangat penting

digunakan untuk pengambilan keputusan optimal dalam berwirausaha.

Keputusan investasi bagi seorang investor tidak terlepas dari factor-faktor yang mempengaruhinya, dimana factor-faktor ini secara empiris berkontribusi signifikan dalam meningkatkan animo pelaku bisnis untuk berinvestasi. Suprasta & MN (2020) dalam pengamatannya terhadap 420 investor saham individu di Indonesia menemukan bahwa keputusan investasi dipengaruhi oleh literasi keuangan. Keputusan investasi juga dipengaruhi oleh literasi keuangan, sebagaimana penelitian terhadap 230 mahasiswi di Surabaya Indonesia yang menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan memiliki galeri investasi di kampusnya dan jumlahnya meningkat signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir, lebih tinggi dibanding mahasiswa laki-laki (Aryani & Cintyawat, 2018). Penelitian terhadap 250 mahasiswa di Bandung Indonesia menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi (Aryani & Cintyawat, 2018).

Penelitian terhadap 200 mahasiswa di Sri Lanka tentang literasi keuangan dalam bentuk keterampilan mengelola keuangan, pengetahuan tentang investasi dan menggunakan produk keuangan lainnya. Hasil penelitian bahwa literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan

investasi mahasiswa (Kumari, 2020). Bahkan di negara maju dan berkembang, literasi keuangan mendorong masyarakat dalam memahami tingkat risiko dan tingkat pengembalian investasi sehingga berhubungan positif terhadap keputusan investasi (Aryani & Cintyawati, 2018; Baihaqqy et al., 2020). Sedangkan literasi keuangan dapat diimplementasikan dalam bentuk pendidikan keuangan yaitu kegiatan menabung, investasi dan penggunaan fasilitas kredit (Ansari, 2018). Berdasar pemikiran diatas maka keputusan investasi dalam penelitian ini diprediksi oleh pendidikan literasi keuangan.

Pendidikan dan literasi keuangan sangat penting tidak saja bagi pemerintah tetapi juga dunia perbankan serta sebagai upaya untuk melindungi konsumen di pasar keuangan. Pendidikan dan literasi keuangan ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mengelola sumber-sumber dan penggunaan uang tunai/non-tunai, memberikan keterampilan dalam menelusuri biaya operasional, serta manajemen keuangan pribadi (Tworek, 2013). Bahkan di Czech Republic pendidikan literasi keuangan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak tahun 2010 sehingga berimplikasi secara langsung terhadap pengambilan keputusan keuangan (Mandell & Klein, 2009).

Pengamatan mendalam peneliti terhadap penelitian terdahulu yang relevan dapat dikemukakan bahwa literasi keuangan dijelaskan oleh tiga aspek yaitu knowledge, attitudes dan behavior (Akmal & Saputra, 2016; Fernandes, 2015; Kaiser & Menkhoff, 2020; Kerr et al., 2016; Luburić & Fabris, 2018; Luksander et al., 2014; Nano & Cani, 2013; Oanea & Dornean, 2013; OECD, 2020; Pavković et al., 2018; Rieger, 2020; Ulfatun et al., 2016).

Pertama financial knowledge, yaitu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar keuangan (yang meliputi perolehan dan pengalokasian sejumlah dana) dapat diperoleh dari pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi khususnya, pada jenjang pendidikan ini memfasilitasi pembelajaran untuk menambah kompetensi yaitu keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarganya. Bahkan Dengan populasi yang lebih banyak dibandingkan kaum tua, kaum muda yaitu siswa sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi sangat antusias menuntut ilmu tentang pengetahuan keuangan.

Secara lebih teknis, pengetahuan pemilik usaha kecil tentang literasi keuangan dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu pemahaman tentang istilah laporan keuangan (pendapatan, biaya kesehatan, biaya pendidikan, pajak, zakat, asuransi, keuntungan), inflasi, bunga majemuk, tabungan, investasi dan

pemahaman mengenai pinjaman (Fernandes, 2015; Kerr et al., 2016; Luburić & Fabris, 2018). Pengetahuan tentang literasi keuangan tidak saja untuk kaum muda, tetapi juga pemilik usaha kecil dimana minat belajarnya tinggi. Sebagai seorang pengusaha dan wirausahawan, pemilik usaha kecil memerlukan pengetahuan keuangan yang cukup untuk mengelola usaha, melakukan investasi dan inovasi untuk perluasan usahanya.

Kedua financial attitudes, merupakan sikap psikologis seseorang tentang keuangan pribadi misalnya terbuka terhadap informasi, bertanggung jawab dan berorientasi masa depan (Andansari, 2018). Penelitian Nano & Cani (2013) yang melakukan survey pada delapan universitas dan 607 siswa menemukan bahwa siswa yang tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan bersikap lebih progresif dibandingkan dengan mereka yang pernah mengikuti kursus keuangan. Mereka yang pernah mengikuti kursus lebih teliti dalam pengambilan keputusan keuangan karena memperhatikan aspek risiko bisnis, sehingga keputusan investasinya banyak pertimbangan. Namun demikian Luburić & Fabris (2018) menjelaskan bahwa financial attitudes diperlukan untuk kepentingan jangka panjang yaitu mencapai kesejahteraan keuangan individu sehingga diperlukan keputusan keuangan yang sehat dan tentunya minimum risiko.

Pemikiran di atas sangatlah jelas bahwa financial attitudes sangat diperlukan oleh individu dalam pengambilan keputusan keuangan termasuk keputusan dalam investasi yang berorientasi jangka panjang. Hasil investasi pada umumnya tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek, sehingga diperlukan sikap positif dari investor. Demikian juga tentang keputusan dalam menggunakan uang (konsumsi) dan menabung, dimana diperlukan sikap yang mengedepankan aspek prioritas terhadap kegiatan konsumsi dan berorientasi jangka panjang terutama keputusan keuangan untuk menabung (OECD, 2020). Secara lebih teknis, sikap pemilik usaha kecil tentang literasi keuangan dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu rencana pinjaman ke bank, kajian tentang profitabilitas, tentang arus kas dan tentang rencana bisnis (Fernandes, 2015).

Ketiga financial behavior merupakan cara dan kebiasaan seseorang dalam mengatur keuangan individualnya mulai dari aspek perencanaan dan pengelolaan hingga pengendalian keuangan (Gahagho et al., 2021; Laily, 2013). Sari (2015) dalam penelitiannya mengurai tentang financial behavior dalam enam aspek yaitu: membayar tagihan tepat waktu, membuat anggaran pengeluaran, mencatat pengeluaran harian dan bulanan, menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga, menabung secara periodik serta membandingkan harga antar toko.

Kemudian survey tentang perilaku keuangan warga Selandia Baru.

Menurut Kempson et al., (2017) bahwa financial behavior dapat dijelaskan dalam bentuk aktif menabung, tidak meminjam untuk pengeluaran konsumtif sehari-hari dan mampu mengendalikan diri dengan mengedepankan prioritas pengeluaran. Kneebone et al., (2013) melakukan survey terhadap masyarakat New Zealand tentang perilaku keuangan menemukan bahwa masyarakat: (1) mempunyai rencana dan tujuan keuangan; (2) mempunyai polis asuransi; (3) mempunyai internet banking; (4) penghasilan lebih tinggi dibanding pengeluaran konsumsi; (5) menghindari bunga utang; (6) mempunyai uang tunai yang cukup; (7) mempunyai kartu kredit. Dan secara lebih teknis, perilaku pemilik usaha kecil tentang literasi keuangan dijabarkan menjadi beberapa aspek yaitu rencana pinjaman ke bank, kajian tentang profitabilitas, tentang arus kas dan tentang rencana bisnis (Fernandes, 2015; Kerr et al., 2016; Luburić & Fabris, 2018).

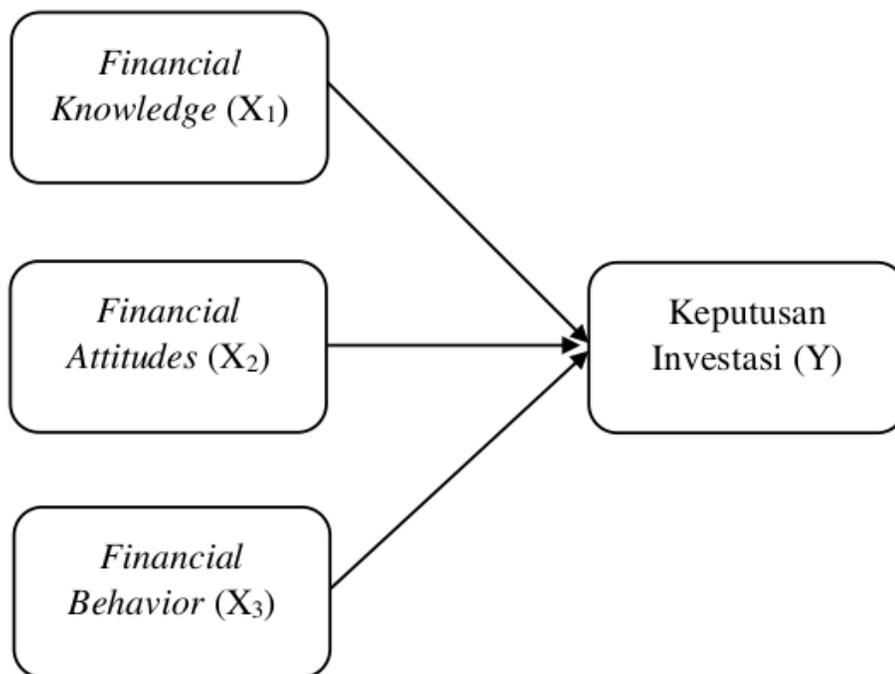
Studi empiris pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Tuban bahwa pengambilan keputusan investasi tidak saja dipengaruhi oleh faktor keuangan, namun juga ada factor lainnya yang sangat dominan mempengaruhi keputusan investasi. Faktor tersebut yaitu faktor non keuangan misalnya

tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, pengalaman kerja pada masa-masa yang telah lalu, perubahan aspek lingkungan perusahaan, aspek politik nasional yaitu pusat dan daerah, aspek budaya kerja perusahaan dan budaya lingkungan setempat, serta aspek sosial kemasyarakatan (Susetyorini & Rusdi, 2016).

Berangkat dari pengamatan empiris di atas, berikut ini dikemukakan tentang kerangka berfikir penelitian, atau disebut juga dengan *Research Framework*, yaitu suatu model yang memberikan gambaran tentang pola pengaruh antar variabel penelitian. Dengan demikian model dapat berbentuk persamaan matematis atau ekonometrika, prototipe dan juga bisa dimodelkan dalam bentuk gambar atau grafik. Penelitian ini dalam mempresentasikan kerangka berfikir penelitian menggunakan gambar yang diturunkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian serta diintegrasikan dengan landasan teori dan landasan empiris yang relevan.

Kepala panah satu arah dari X_1 menuju Y berarti Financial Knowledge (X_1) mempengaruhi Keputusan Investasi (Y). Demikian juga dengan Financial Attitudes (X_2) mempengaruhi Keputusan Investasi (Y). Sedangkan Financial Behavior (X_3) mempengaruhi Keputusan Investasi (Y). Kepala panah satu arah ini juga mencerminkan hubungan pengaruh yang diselesaikan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Sedangkan

kepala panah *double* atau dua arah (ganda, bolak-balik) mencerminkan penyelesaian kasus dengan korelasi. Kerangka berfikir penelitian di bawah ini mencerminkan penelitian yang lazimnya diselesaikan menggunakan jenis penelitian asosiatif yaitu regresi linear berganda mengangat garis panahnya hanya terdapat satu kepala panah atau satu arah.



Gambar 6.1. Model Keputusan Investasi

Keterangan:

1. Pengaruh Financial Knowledge (X₁) terhadap Keputusan Investasi (Y) didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu: (Akmal & Saputra, 2016; Fernandes, 2015; Kaiser &

Menkhoff, 2020; Kerr et al., 2016; Luburić & Fabris, 2018; Luksander et al., 2014; Nano & Cani, 2013)

2. Penguatuh Financial Attitudes (X_2) terhadap Keputusan Investasi (Y) didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu: (Andansari, 2018; Fernandes, 2015; Luburić & Fabris, 2018; Nano & Cani, 2013; OECD, 2020).
3. Penguatuh Financial Behavior (X_3) terhadap Keputusan Investasi (Y) didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu: (Fernandes, 2015; Gahagho et al., 2021; Kempson et al., 2017; Kerr et al., 2016; Kneebone et al., 2013; Laily, 2013; Luburić & Fabris, 2018; Sari, 2015; Susetyorini & Rusdi, 2016).



Bab 7

Faktor-faktor Keputusan Investasi

Keputusan investasi dalam penelitian ini diturunkan menjadi tujuh indikator yaitu: (1) pemahaman tentang risiko (ada satu instrument yaitu pemahaman tentang risiko investasi); (2) keuntungan (satu instrumen yaitu motivasi keuntungan); (3) ketersediaan modal, dengan satu instrument yaitu ketersediaan modal; (4) rekomendasi pakar, ada satu instrument yaitu mendapat rekomendasi dari pakar; (5) kondisi ekonomi, satu instrument yaitu kondisi ekonomi yang stabil; (6) akses keuangan dengan dua instrument yaitu kemudahan dalam mengakses lembaga keuangan perbankan serta kemudahan dalam mengakses lembaga keuangan non-perbankan; (7) akses teknologi yang dijabarkan menjadi satu instrument yaitu kemudahan dalam mengakses teknologi sebagai bentuk layanan lembaga keuangan.

Instrumen penelitian tersebut di atas kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, dan menurut hasil analisis seluruh instrumen valid karena lebih dari 0,30 dan reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* > 0,6.

Tabel 7.1. Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	181	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	181	100.0

Tabel 7.2. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.684	8

Tabel 7.3. Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	26.4033	11.664	.349	.661
Y2	26.0829	12.676	.403	.655
Y3	26.5856	11.044	.409	.646
Y4	26.6685	11.867	.309	.671
Y5	26.3425	12.282	.369	.656
Y6	26.5470	12.138	.485	.638
Y7	27.1934	11.546	.360	.658
Y8	27.2707	11.121	.397	.649

A. Financial Knowledge

Pengetahuan investasi (*Financial Knowledge*) dalam studi ini dijabarkan menjadi enam indikator yaitu: (1) Pengetahuan

mengenai pinjaman dengan instrument: Pengetahuan tentang pinjaman diperoleh dari sekolah/kampus, Pengetahuan tentang pinjaman diperoleh dari seminar, Pengetahuan tentang pinjaman diperoleh dari pelatihan serta Pengetahuan tentang pinjaman diperoleh dari belajar mandiri; (2) Pengetahuan tentang istilah laporan keuangan diturunkan menjadi satu instrument yaitu Memiliki pengetahuan tentang akun-akun laporan keuangan; (3) Pengetahuan tentang istilah inflasi diturunkan menjadi satu instrument yaitu Memiliki pengetahuan tentang laporan inflasi; (4) Pengetahuan tentang istilah bunga majemuk dijelaskan oleh Memiliki pengetahuan tentang bunga majemuk; (5) Pengetahuan tentang istilah tabungan dijelaskan dengan Memiliki pengetahuan tentang tabungan; (6) Pengetahuan tentang istilah investasi dijelaskan dengan Memiliki pengetahuan tentang investasi.

Instrumen penelitian tersebut di atas kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, dan menurut hasil analisis seluruh instrumen valid karena lebih dari 0,30 dan reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* > 0,6.

Tabel 7.4. Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	181	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	181	100.0

Tabel 7.5. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.714	9

Tabel 7.6. Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	28.0000	11.733	.359	.694
X1.2	28.2210	11.429	.387	.689
X1.3	28.8398	11.180	.409	.685
X1.4	28.1326	12.060	.389	.690
X1.5	29.1492	10.650	.482	.669
X1.6	28.4144	11.633	.348	.696
X1.7	28.6464	11.452	.442	.679
X1.8	27.6630	12.502	.324	.700
X1.9	28.0497	11.125	.366	.695

B. Financial Attitudes

Sikap keuangan (*Financial Attitudes*) dalam studi ini diturunkan menjadi empat indicator yaitu: (1) Rencana pinjaman ke bank dengan indicator Selalu membuat perencanaan pinjaman ke bank; (2) Kajian tentang profitabilitas dijabarkan dalam instrument: Selalu membuat kajian tentang profitabilitas; (3) Kajian tentang arus kas diturunkan menjadi instrument yaitu Selalu membuat kajian tentang arus kas; dan (4) Kajian tentang rencana bisnis terdapat tiga instrumen yaitu: Selalu membuat kajian tentang rencana bisnis, Selalu membuat catatan dalam

membuat rencana bisnis serta Selalu membuat analisis terhadap rencana bisnis.

Instrumen penelitian tersebut di atas kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, dan menurut hasil analisis seluruh instrumen valid karena lebih dari 0,30 dan reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* > 0,6.

Tabel 7.7. Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	181	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	181	100.0

Tabel 7.8. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	6

Tabel 7.9. Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	19.3370	4.402	.440	.665
X2.2	19.1878	4.631	.332	.698
X2.3	20.1436	3.513	.499	.656
X2.4	18.9945	4.717	.437	.670
X2.5	19.1547	4.420	.499	.649
X2.6	19.1492	4.550	.485	.656

C. Financial Behavior

Perilaku keuangan (*Financial Behavior*) dijabarkan menjadi enam indikator yaitu: (1) Membayar tagihan tepat

waktu dengan instrument Selalu membayar tagihan tepat waktu; (2) Membuat anggaran pengeluaran dengan dua instrument yaitu: Selalu membuat anggaran pengeluaran serta Selalu membuat skala prioritas dalam Menyusun anggaran pengeluaran; (3) Mencatat pengeluaran harian dan bulanan dengan dua instrument yaitu: Selalu mencatat pengeluaran harian dan Selalu mencatat pengeluaran bulanan; (4) Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga dengan instrument Selalu menyediakan dana untuk alokasi pengeluaran tidak terduga; (5) Menabung secara periodic dengan instrument Selalu menabung secara periodic dan (6) Membandingkan harga antar toko dengan instrument Selalu membandingkan harga.

Instrumen penelitian tersebut di atas kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, dan menurut hasil analisis seluruh instrumen valid karena lebih dari 0,30 dan reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* > 0,6.

Tabel 7.10. Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	181	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	181	100.0

Tabel 7.11. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.793	8

Tabel 7.12. Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	25.8840	8.992	.523	.768
X3.2	26.6077	8.417	.614	.753
X3.3	25.8508	8.872	.534	.766
X3.4	26.7956	8.352	.532	.765
X3.5	26.1215	8.863	.526	.767
X3.6	25.9448	8.986	.392	.787
X3.7	26.0000	8.722	.454	.778
X3.8	26.7569	8.196	.482	.776



Financial Knowledge

Berdasar hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa *Financial knowledge* berpengaruh negative tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Akmal & Saputra (2016) yang menemukan bahwa pengetahuan mempengaruhi keputusan investasi seratus mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang. Perbedaan penelitian disebabkan oleh karakter responden yang berbeda, dimana penelitian ini memilih responden pemilik UMKM dengan demikian memiliki karakter yang berbeda dibanding para mahasiswa. Kisi-kisi instrument penelitian ini juga berbeda sehingga persepsi responden juga berbeda.

Hasil penelitian ini juga tidak relevan dengan penelitian Kaiser & Menkhoff (2020) yang melakukan studi tentang pendidikan dalam mengalokasi keuangan di sekolah. Lembaga pendidikan formal ini mampu meningkatkan pengetahuan tentang keuangan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu

karena factor latar belakang pendidikan responden. Dimana responden penelitian ini yaitu pemilik UMKM di Tulungagung yang memiliki pendidikan formal yang heterogen dan mayoritas berpendidikan sekolah menengah non ekonomi.

Pembelajaran keuangan di sekolah diyakini oleh Kaiser & Menkhoff (2020) dapat mendorong pemahaman siswa terhadap keuangan, dan relevan dengan penelitian ini. Namun demikian, dalam kaitannya dengan keputusan investasi hasil penelitian berbeda dengan penelitian Kaiser & Menkhoff (2020) yang hanya berorientasi pada kompetensi kognitif. Sedangkan penelitian ini sangat erat kaitannya dengan keputusan investasi yang juga dipengaruhi oleh factor-faktor non teknis atau factor-faktor non-ekonomi.

Penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Luksander et al., (2014); Nano & Cani (2013) karena hanya bersifat teoritis, bahwa pendidikan keuangan dapat mendorong peningkatan pengetahuan tentang keuangan. Perbedaannya dengan penelitian ini karena factor karakteristik responden, dimana responden penelitian ini bukan dari kalangan pelajar atau mahasiswa, tetapi pelaku usaha yang cenderung berorientasi pada keuntungan dalam investasi.



Bab 9

Financial Attitudes

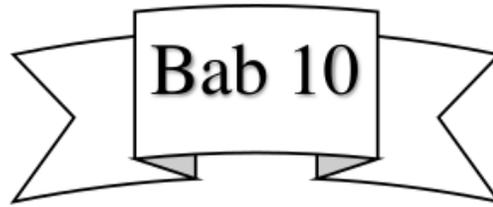
Berdasar hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa *Financial attitudes* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Namun demikian variabel *Financial attitudes* memiliki kontribusi paling kuat dalam mempengaruhi keputusan investasi. *Financial attitudes* ini diukur oleh tiga aspek yaitu: rencana pinjaman ke bank, konsep profitabilitas dan konsep tentang arus kas. Responden penelitian ini menyadari sepenuhnya bahwa untuk memutuskan memilih investasi tidak cukup hanya dengan motivasi, tetapi dibutuhkan kajian mendalam misalnya terkait dengan sumber pendanaan. Pendanaan bisa diperoleh dari perbankan sehingga diperlukan perencanaan sebelum mengajukan pinjaman ke bank. Keputusan investasi juga ditentukan oleh potensi keuntungan yang diharapkan. Karena semakin besar potensi keuntungan maka lazimnya investor semakin tertarik dalam melakukan investasi.

Meskipun hasilnya tidak signifikan, namun demikian hasil penelitian ini relevan dengan studi Andansari (2018) dan Nano & Cani (2013). Hasil studi yang sama juga dilakukan oleh Luburić & Fabris (2018) bahwa dalam jangka panjang diperlukan sikap yang tidak hanya berorientasi dalam jangka pendek misalnya keuntungan, tetapi juga diperlukan keberlanjutan usaha. Keberlanjutan inilah yang sangat penting dalam suatu investasi. Oleh karenanya diperlukan sikap yang sabar waspada dalam berinvestasi dan perlu dihindari investasi yang risiko tinggi meskipun keuntungannya besar seperti yang sekarang ini berkembang dengan “investasi bodong”.

Pengaruh dominan variabel *Financial attitudes* ini sekaligus memberikan bukti empiris bahwa *Financial knowledge* dan *Financial behavior* saja tidak cukup dijadikan pertimbangan oleh investor dalam memutuskan untuk memilih tujuan investasi. Investor selalu berharap investasinya berkembang dan berumur panjang, sehingga pengetahuan dan perilaku yang didorong oleh *Financial attitudes* akan melahirkan sebuah nilai guna yang memiliki kemanfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta bermanfaat bagi investor, rekan kerja dan stakeholders lainnya misalnya masyarakat sekitar dan pemerintah untuk bersama-sama

menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian Christanti & Mahastanti (2011) bahwa sikap investor, apakah senitif atau hati-hati, atau justru menghindari risiko menjadi factor penting dalam membuat keputusan investasi. Menurut Panjaitan & Listiadi (2021), sikap keuangan akan mempengaruhi perencanaan investasi. Sikap yang dimaksud yaitu sikap kehati-hatian dalam mengalokasikan sumber-sumber keuangan yang sifatnya terbatas sehingga diperlukan perencanaan investasi yang minimal risikonya.



Bab 10

Financial Behavior

Berdasar hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa *Financial behavior* berpengaruh negative tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nareswari et al., (2021) yang mengemukakan bahwa aspek perilaku berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan responden yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung sebanyak 181 orang, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan responden sebanyak 413 investor individu. Perbedaan lainnya yaitu pada latarbelakang pendidikan responden, dimana penelitian ini mayoritas berpendidikan sekolah dasar dan penelitian terdahulu berpendidikan sarjana dan pascasarjana yang tergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di beberapa universitas di Indonesia.



Bab 11

Penutup

Keputusan investasi pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi aspek *financial knowledge*, *financial attitudes* dan *financial behavior*. Meskipun hasilnya tidak signifikan, namun demikian terdapat aspek yang secara empiris memiliki kontribusi positif bagi pelaku UMKM yang secara umum dapat disimpulkan berikut ini.

1. Aspek *financial knowledge* pelaku UMKM dalam penelitian ini antara lain diukur oleh pemahaman tentang risiko investasi, motivasi keuntungan dan ketersediaan modal untuk investasi, yang ternyata tidak dapat mempengaruhi keputusan investasi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya latarbelakang pendidikan dan karakter pelaku UMKM yang masih dalam skala mikro dan kecil.
2. Aspek *financial attitudes* pelaku UMKM dalam studi ini antara lain diukur oleh pengetahuan tentang pinjaman diperoleh dari sekolah/kampus, pengetahuan tentang

pinjaman diperoleh dari seminar, pengetahuan tentang pinjaman diperoleh dari pelatihan serta pengetahuan tentang pinjaman diperoleh dari belajar mandiri. Pada aspek ini pelaku UMKM memberi respon positif, dimana *financial attitudes* mendorong keputusan investasi.

3. Aspek *financial behavior* pelaku UMKM dalam studi ini antara lain diukur oleh selalu membuat anggaran pengeluaran serta selalu membuat skala prioritas dalam menyusun anggaran pengeluaran. Aspek ini tidak memberi kontribusi positif terhadap keputusan investasi pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung, karena secara umum karakter bisnis pelaku UMKM ini masih tergolong pengusaha lokal yang perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dan mengintegrasikan stakeholder yang ada.

Saran penelitian ini difokuskan pada 3 pihak yaitu:

1. Bagi pelaku UMKM. Disarankan untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya, dalam bentuk optimis bahwa dengan pengetahuan, sikap dan perilaku keuangan dapat meningkatkan baik kuantitas dan kualitas dalam membuat keputusan investasi;
2. Bagi Pemerintah Daerah. Disarankan untuk memberikan akses pasar, teknologi informasi, status badan hukum, dana

pengembangan dan lain-lain menuju UMKM yang berdayasaing;

3. Bagi peneliti yang akan datang. Disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, yaitu dengan memposisikan *financial attitudes* sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi keputusan investasi pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Tulungagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, I. (2018). *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Akmal, H., & Saputra, Y. . (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, *1(2)*, 235–244.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jebi.v1i2.37>
- Amuko, D. A. (2015). SMEs' Investment Decisions: An Assessment on Technology Investments by SMEs in Nairobi, Kenya. In *United States International University–Africa*. <http://41.204.183.105/handle/11732/2775>. *Theses and Dissertations*.
- Andansari, P. I. (2018). The Influence of Financial Attitude and Social Environment on Student Financial Literacy. *Ecodunamika : Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *1(1)*, 31–37.
<https://ejournal.uksw.edu/ecodunamika/article/view/1519>
- Ansari, Y. (2018). Investment Decisions As Related To Academic Background and Other Factors-an Empirical Assessment. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, *VI(7)*, 152–159.
<http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2018/07/678.pdf>
- Ariyani, D. (2018). PENDIDIKAN LITERASI KEUANGAN PADA ANAK USIA DINI DI TK KHALIFAH PURWOKERTO. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*.
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp175-190>
- Aryani, S., & Cintyawat, C. (2018). Factors Influence Investment Decision among University Student With Different Education Background: A Case Study in Bandung. *Jurnal Rekayasa Sistem Dan Industri*, *5(2)*, 101–

107. <https://doi.org/https://doi.org/10.25124/jrsi.v5i01.292>
- Baihaqqy, M. R. ., Disman, Nugraha, Sari, M., & Ikhsan, S. (2020). The Effect of Financial Literacy on the Investment Decision. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 3073–3083. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1333>
- Christanti, N. & Mahastanti, L. A. (2011). Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Investor dalam Melakukan Investasi. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. 4(3). 37-51.
- Curtis, D., & Irvine, I. (2017). *Principles of Macroeconomics*. <https://lyryx.com/wp-content/uploads/2017/08/CI-Principles-of-Macroeconomics-2017-RevisionB.pdf>
- Douglas, E. J. (1987). Managerial economics: Analysis and strategy. In *Third edition Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1987, pp. xxiv, 648*.
- DSN-MUI. (2012). Fatwa DSN MUI No : 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1–18.
- Falkner, E. M., & Hiebl, M. R. W. (2015). Risk management in SMEs : a systematic review of available evidence. *The Journal of Risk Finance*, 16(2), 122–144. <https://doi.org/10.1108/JRF-06-2014-0079>
- Fernandes, T. I. M. (2015). *Financial Literacy Levels of Small Businesses Owners and it Correlation with Firms ' Operating Performance*. <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/81668/2/37453.pdf>
- Field, A. (2009). *Discovering Statistics Using SPSS*. London: SAGE Publications Ltd.
- Gahagho, Y. ., Rotinsulu, T. ., & Mandej, D. (2021). The Influence of Financial Literation on Financial Attitudes and Revenue Resources on Financial Management Behavior of

- Students of the Faculty of Economics and Business UNSRAT With Intention as Intervening Variables. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 543–555. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32337>
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gill, S., Kashif Khurshid, M., Mahmood, S., & Ali, A. (2018). Factors Effecting Investment Decision Making Behavior: The Mediating Role of Information Searches. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 7(4), 758–767. <https://core.ac.uk/download/pdf/296307539.pdf>
- Gveroski, M., & Jankuloska, A. R. (2019). Determinants of Investment Decisions in Smes Determinants of Investment Decisions in Smes. *Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences*, 03(01), 71–78.
- H, L. P. H., D, N. F., G, N. A., A, M. Al, & Y, A. N. (2020). *Edukasi Investasi Bagi Remaja Lingkungan Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang*. [https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3374141013_6_Kelurahan Jatisari_20200914_131430.pdf](https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3374141013_6_Kelurahan%20Jatisari_20200914_131430.pdf)
- Hariyanto. (1988). *Akuntansi Program Ilmu-Ilmu Sosial*. Surakarta: Intan Pariwara.
- Herdjiono, I., Damanik, L. A. (2016). Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 9(3). 226-241.
- Herlianto, D. (2013). *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2020). Financial education in schools: A meta-analysis of experimental studies. In

- Economics of Education Review* (Vol. 78).
<https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101930>
- Kempson, E., Finney, A., & Poppe, C. (2017). Financial Well-being: A Conceptual Model and Preliminary Analysis. In *SIFO Consumption Research Norway* (Issue August).
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18737.68961>
- Kerr, G., Fair, A., & Chakarov, G. (2016). *Financial Literacy Outcome Indicators*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/144778053.pdf>
- Kholilah, N. A., Iramani, R. (2013). Studi *Financial Management Behavior* pada Masyarakat Surabaya. *Journal of Business and Banking*, 3(1). 69-80.
 DOI: <http://dx.doi.org/10.14414/jbb.v3i1.255>
- Kneebone, D., Menzies, M., & Maloney, K. (2013). *Financial Knowledge and Behaviour Survey Key Point Summary*.
<http://www.cflri.org.nz/sites/default/files/docs/FL-FinKnowBehavSurvey-Summary-Jun-2013.pdf>
- Kumari, D. A. . (2020). The Impact of Financial Literacy on Investment Decisions: With Special Reference to Undergraduates in Western Province , Sri Lanka THE IMPACT OF FINANCIAL LITERACY ON INVESTMENT DECISIONS: WITH SPECIAL REFERENCE TO UNDERGRADUATES IN Keyword s. *Asian Journal of Contemporary Education*, 4(2), 110-126.
<https://doi.org/10.18488/journal.137.2020.42.110.126>
- Laila, V., Hadi, S., & Subanji, S. (2019). Pelaksanaan Pendidikan Literasi Finansial pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 4(11), 1491. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i11.13016>
- Laily, N. (2013). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Mahasiswa dalam Mengelola Keuangan. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(4), 201–2017.
<https://doi.org/10.26675/jabe.v1i4.6042>

- Luburić, R., & Fabris, N. (2018). Financial literacy in terms of quality of life. *20th National and 6th International Conference, Quality System Condition for Successful Business and Competitiveness, Kapaonik, Kraljevi Cardavi 28.11-30.11.2018*, 45–52. https://www.researchgate.net/publication/329416661_FINANCIAL_LITERACY_IN_TERMS_OF_QUALITY_OF_LIFE
- Ludmila, K., Lubor, H., & Dimitris, K. (2017). The Effect of Business Environment and Entrepreneurs' Gender on Perception of Financial Risk in The Smes Sector. *Journal of Competitiveness*, 9(1), 36–50. <https://doi.org/10.7441/joc.2017.01.03>
- Luksander, A., Béres, D., Huzdik, K., & Németh, E. (2014). Analysis of the factors that influence the financial literacy of young people studying in higher education. *Public Finance Quarterly*, 2, 220–241. http://real.mtak.hu/39203/1/a_luksandera_2014_2.pdf
- Mandell, L., & Klein, L. . (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 20(1), 15–24. <https://ssrn.com/abstract=2224231>
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics, 8th ed.* Harvard University. ISBN: 9781305585126.
- Nafik, M. (2009). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Nano, D., & Cani, S. (2013). The Differences in Students' Financial Literacy based on Financial Education. *Academicus - International Scientific Journal*, 08(02), 149–160. <http://dspace.epoka.edu.al/handle/1/1440>
- Nofsinger, J. R. (2001). *Investment Madness: How Psychology Affects Your Investing-- and what to Do about it*. Financial Times Prentice Hall. ISBN 0130422002, 9780130422002

- Oanea, D.-C., & Dornean, A. (2013). Defining and Measuring Financial Literacy. New Evidence from Romanian' Students of the Master in Finance. *Annals of the Alexandru Ioan Cuza University - Economics*, 59(2), 113–129. <https://doi.org/10.2478/v10316-012-0036-3>
- OECD. (2020). *OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy*. www.oecd.org/financial/education/launchoftheoecdinfeglobalfinancialliteracysurveyreport.htm
- Panjaitan, N. F. H. & Listiadi, A. (2021). Literasi Keuangan dan Pendapatan pada Keputusan Investasi dengan Perilaku Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 142-155. ISSN: 2599-2651
- Pavković, A., Anđelinović, M., & Mišević, D. (2018). Measuring financial literacy of university students. *Croatian Operational Research Review*, 9(1), 87–97. <https://doi.org/10.17535/crorr.2018.0008>
- Pratomo, E. P., & Nugraha, U. (2001). *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Moder*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rapih, S. (2016). Pendidikan Literasi Keuangan Pada Anak: Mengapa dan Bagaimana? *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 14–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2016.v6.i2.p14-28>
- Rieger, M. O. (2020). How to Measure Financial Literacy? *Journal of Risk and Financial Management*, 13(12), 324. <https://doi.org/10.3390/jrfm13120324>
- Santoso, S. (2006). *Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 14*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, D. A. (2015). Financial Literacy and Student Financial Behavior (Case Study STIE “YPPI” Rembang). *Buletin*

- Bisnis & Manajemen*, 01(02), 171–189.
<https://media.neliti.com/media/publications/58351-ID-finalcial-literacy-dan-perilaku-keuangan.pdf>
- Sari, D. E. (2018). Pendidikan Literasi Keuangan melalui Program Kemitraan dengan Bank untuk Mengurangi Perilaku Konsumtif pada Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 28(1), 22–30.
- Sharma, R. K., & Sharma, R. (2014). Study of Factors Influencing Investment Decision of Households in Oman. *Conference: 2nd International Conference on 'Technological and Management Advances in the New Age Economy: An Industry Perspective,' March*, 92–101.
https://www.researchgate.net/publication/263581933_Study_of_Factors_Influencing_Investment_Decision_of_Households_in
- Steinerowska-Streb, I., & Steiner, A. (2014). An Analysis of External Finance Availability on SMEs' Decision Making: A Case Study of the Emerging Market of Poland. *Thunderbird International Business Review*, 56(4), 373–386. <https://doi.org/10.1002/tie.21627>
- Suhendah, R., & Nathania, N. (2020). Investment Decision: The Case of Indonesian Manufacturing Companies. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 145(Icebm 2019), 207–212.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200626.038>
- Sujianto, A. E. (2007). *Aplikasi Statistik dengan SPSS untuk Pemula*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sumarau, S. K. (2019). The Effect of Investment Decisions, Funding Decisions, and Profitability on Manufacturing Company Value in Indonesia Stock Exchange 2015-2018 Period. *Accountability*, 8(2), 85.
<https://doi.org/10.32400/ja.24759.8.2.2019.85-90>
- Susetyorini, & Rusdi, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Non

Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Seksi Operasi Utilitas PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk . – Tuban. *GEMA Ekonomi Jurnal Fakultas Ekonomi*, 05(02), 172–177. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=906955&val=14282&title=ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON KEUANGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DI SEKSI OPERASI UTILITAS PT SEMEN INDONESIA PERSERO TBK TUBAN](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=906955&val=14282&title=ANALISIS_FAKTOR-FAKTOR_NON_KEUANGAN_DALAM_PENGAMBILAN_KEPUTUSAN_INVESTASI_DI_SEKSI_OPERASI_UTILITAS_PT_SEMEN_INDONESIA_PERSERO_TBK_TUBAN)

- Toha, M., Zuana, M. M. M., & Zamroni, M. A. (2020). Analysis of Sharia Investment Gallery'S Innovative Strategy in Increasing Millennial Investors' Interests Through As-Salam Programs. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 20–32. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i2.3886>
- Tworek, P. (2013). The Investment Decision-Making Process in Entrepreneurship: Advantages and Disadvantages of Selected Financial Methods Used in Projects Evaluation. *9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions, September*, 995–1005.
- Ulfatun, T., Udhma, U. ., & Dewi, R. . (2016). Analysis on Financial Literacy Level of the Students of 2012-2014 Classes of Economics Faculty of Yogyakarta State University. *PELITA*, XI(2), 1–13. <https://journal.uny.ac.id/index.php/pelita/article/view/10924>
- Virlics, A. (2013). Investment Decision Making and Risk. *Procedia Economics and Finance*, 6(December 2013), 169–177. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00129-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00129-9)
- Widiarti, S. (2020). Analisis Penilaian dan Penerapan Keputusan Investasi. Jakarta: Universitas Mercubuana. https://www.researchgate.net/publication/340844487_SET

IANI_WIDIARTI_43219010085_-

_Artikel_Penilaian_dan_Penerapan_Keputusan_Investasi

Wüstermann, R. P. (2016). Do decision-makers in SMEs have higher risk aversion than in large enterprises? *Zeitschrift Für Interdisziplinäre Ökonomische Forschung, Allensbach Hochschule*, 2(November), 72–78.

Zhao, R., & Zhang, X. (2019). Analysis of Investment Decisions of SMEs. *Analysis of Investment Decisions of SMEs. Proceedings of the 2019 International Conference on Management, Education Technology and Economics (ICMETE 2019)*. May. 427-430., 82(Icmete), 427–430. <https://doi.org/10.2991/icmete-19.2019.102>

Lampiran:

**SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 30 /SEOJK.07/2017**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN DI SEKTOR
JASA KEUANGAN**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai peningkatan Literasi Keuangan Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan

peserta pada Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
5. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
6. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PUJK, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
7. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

II. TUJUAN LITERASI KEUANGAN

1. Tujuan Literasi Keuangan adalah:
 - a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
 - b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.
2. Pencapaian tujuan Literasi Keuangan secara nasional dapat diketahui dengan pelaksanaan survei.

III. RUANG LINGKUP UPAYA PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

1. Edukasi Keuangan; dan
2. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disusun oleh PUJK sebagai program tahunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Terencana dan Terukur, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dengan konsep yang sesuai sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta mendasarkan pada indikator tertentu untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan;
 - b. Berorientasi pada Pencapaian, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui kegiatan untuk mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
 - c. Berkelanjutan, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang terhadap pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - d. Kolaborasi, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dengan memperhatikan peran masing-masing PUJK.

V. PEMBENTUKAN DAN TUGAS DARI FUNGSI ATAU UNIT LITERASI KEUANGAN

1. Pembentukan Fungsi atau Unit Literasi Keuangan
 - a. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan oleh PUJK dengan membentuk fungsi atau unit Literasi Keuangan.
 - b. Fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berada pada unit kerja

yang telah ada kecuali pada unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.

- c. Fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling rendah dipimpin oleh pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- d. Fungsi atau unit Literasi Keuangan bertanggung jawab kepada Direksi.
- e. Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk fungsi atau unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dilakukan berdasarkan penilaian mandiri PUJK dengan mempertimbangkan:
 1. jumlah aset PUJK;
 2. jumlah kantor PUJK;
 3. jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
 4. jumlah Konsumen; dan/atau
 5. jumlah sumber daya manusia PUJK.
- f. Dalam hal perusahaan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini, entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan.

Contoh bagan fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Tugas dari Fungsi atau Unit Literasi Keuangan
Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling kurang menjelaskan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV;
 2. penyusunan rencana dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi

- Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 1;
3. pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VII; dan
 4. penyusunan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VIII angka 2.
- b. merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, yang dilakukan dengan:
1. menganalisis berbagai informasi diantaranya mengenai tingkat Literasi Keuangan, tingkat pendapatan, dan/atau jumlah dan komposisi demografi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 2. melakukan observasi terhadap wilayah yang akan menjadilokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 3. menyiapkan materi Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan keuangan dari sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan atau menyempurnakan materi yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan keuangan dari sasaran kegiatan;
 4. menyiapkan kerja sama dengan pihak lain;
 5. menentukan pencapaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 6. menentukan bentuk dan metode kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan angka 1) sampai dengan angka 5); dan
 7. menentukan parameter dan bentuk atas pemantauan dan/atau evaluasi.
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan memperhatikan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV.

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK termasuk penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV, yang dilakukan dengan:
 - 1. menyusun dan menggunakan bentuk pemantauan yang dapat memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan rencana;
 - 2. mengevaluasi proses dan dampak pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 3. mengidentifikasi pencapaian, hambatan, dan tantangan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan menyusun rekomendasi perbaikanselanjutnya; dan
 - 4. menyusun laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- e. menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- g. Tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

VI. TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

- 1. Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan.
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Rangka

Meningkatkan Literasi Keuangan

1. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. bentuk pelaksanaan;
 - d. metode pelaksanaan;
 - e. materi;
 - f. sasaran dan jumlah peserta;
 - g. jadwal dan wilayah pelaksanaan;
 - h. frekuensi pelaksanaan;
 - i. sumber dan jumlah biaya;
 - j. metode dan sarana pengukuran;
 - k. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 - l. kerja sama dengan pihak lain dan peran masing- masing pihak.
2. Peran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf l) dapat berupa penyediaan sumber daya manusia, dana, dan/atau tempat.
3. Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
4. Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
5. Penetapan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan mengacu pada strategi Literasi Keuangan di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK.
- b. Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 1. Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
 2. Direksi memastikan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disampaikan kepada OJK sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan dicantumkan dalam Rencana Bisnis PUJK.
 4. Pencantuman laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dimuat pada bagian tersendiri dalam Rencana Bisnis PUJK.
 5. Laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
 6. Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, laporan rencana kegiatan wajib disampaikan kepada OJK oleh masing-masing PUJK.
 7. Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilaksanakan.
 8. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7) jatuh pada hari libur, laporan rencana tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 9. Laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
 10. Penyampaian tembusan sebagaimana

dimaksud pada angka 9) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.

11. Dalam hal penyampaian tembusan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 10) mengalami gangguan maka penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- c. Penyesuaian/Perubahan Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 1. Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. permintaan OJK; dan/atau
 - b. inisiatif PUJK.
 2. Penyesuaian laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1)huruf a), disampaikan pada:
 - a. waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
 - b. paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian OJK dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK.
 3. Perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan inisiatif PUJK sebagaimana

dimaksud pada angka 1) huruf b), memperhatikan:

- a. penyampaian perubahan laporan dilakukan:
 - i. sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
 - ii. dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perubahan Rencana Bisnis PUJK, perubahan laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dan tidak melampaui tanggal 30 Juni pada tahun berjalan; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jumlah perubahan Rencana Bisnis PUJK, PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode pelaporan.
4. Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
 5. Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
 6. Dalam hal penyampaian tembusan penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan

melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengalami gangguan, penyampaian tembusan laporan dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

2. Pengukuran atas Perencanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan metode dan sarana pengukuran untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
 - b. Metode pengukuran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a antarlain menggunakan:
 1. metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan (*pre-test* dan *post-test*);
 2. metode pengukuran melalui jajak pendapat bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara *online* melalui laman atau media elektronik lainnya. Topik jajak pendapat antara lain mengenai manfaat, kemudahan materi dipahami, atau kesesuaian dengan sasaran;
 3. metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan perorangan/kelompok tertentu melalui survei;
 4. metode pengukuran yang mengamati penyelesaian pengembangan/pembangunan infrastruktur;
 5. metode pengukuran melalui uji kesesuaian pengembangan/ pembangunan fungsi infrastruktur bagi target tertentu; dan/atau
 6. metode pengukuran lainnya yang disesuaikan

dengan bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

- c. Sarana pengukuran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara tertulis, melalui media elektronik, dan/atau melalui sistem *online*.
3. Parameter dan Bentuk atas Pemantauan dan/atau Evaluasi Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan parameter dan bentuk pemantauan kegiatan sebagai ukuran dan alat untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Parameter dan bentuk pemantauan kegiatan tersebut memperhatikan:
 1. parameter pemantauan, antara lain terdiri dari kesesuaian bentuk kegiatan, materi, sasaran, jumlah peserta Edukasi Keuangan, tahapan, dan pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur; dan/atau
 2. bentuk pemantauan, antara lain berupa kunjungan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan.
 - b. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan parameter dan bentuk evaluasi kegiatan sebagai ukuran dan alat untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik dari sisi materi, infrastruktur, dan pelaksanaannya dalam memberikan dampak yang diharapkan dan terlaksana secara efisien serta sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Parameter dan bentuk evaluasi kegiatan tersebut memperhatikan:
 1. parameter evaluasi, antara lain terdiri dari

peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, sikap, dan perilaku peserta Edukasi Keuangan, terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pembangunan infrastruktur.

2. bentuk evaluasi, antara lain berupa:
 - a. memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan;
 - b. memperhatikan data dan laporan dari periode- periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola;
 - c. melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d. menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan; dan
 - e. menganalisis hasil pemantauan lainnya (jika ada).
- c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses maupun dampak dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. Hasil pemantauan dan/atau evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan tersebut, dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun berikutnya.
- d. Pemantauan terhadap proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain terdiri dari pendataan *output* setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan atau *output* pada setiap tahap rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- e. Pemantauan terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain terdiri dari pendataan *outcome* setiap kegiatan dalam rangka

meningkatkan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK.

- f. Evaluasi terhadap proses sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki tujuan untuk:
 - 1. mengetahui dan menilai kegiatan yang telah berlangsung;
 - 2. mengetahui kesesuaian realisasi kegiatan dengan tujuan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 3. mengetahui kesesuaian waktu antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 4. mengetahui kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 5. mengetahui kualitas petugas yang melaksanakan kegiatan, dan/atau pihak lain dalam rangka kerja sama (apabila ada);
 - 6. mengetahui kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan;
 - 7. mengetahui hal lain yang terkait pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan
 - 8. mengetahui rekomendasi terhadap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- g. Evaluasi terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki tujuan untuk:
 - 1. mengetahui dan menilai kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan/atau perilaku peserta;
 - 2. mengetahui dampak keseluruhan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada peserta;
 - 3. mengetahui dampak dari aspek tertentu dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. Yang dimaksud dengan aspek tertentu seperti bentuk kegiatan, cara penyampaian, atau materi terhadap peningkatan Literasi Keuangan

- peserta, sehingga PUJK mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran kegiatan; dan
4. mengetahui dampak kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada peserta yang berasal dari berbagai segmen masyarakat.

VII. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan terdiri dari:
 1. kegiatan yang menjelaskan produk dan/atau layanan jasa keuangan tanpa menyebutkan merek produk dan/atau layanan jasa keuangan tertentu dan/atau PUJK tertentu yang disampaikan kepada Konsumen dan/atau masyarakat selain pegawai maupun tenaga pemasaran dari PUJK yang bersangkutan; dan/atau
 2. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam rangka transparansi dalam bentuk pemasaran berupa:
 1. menjual atau mendorong penggunaan merek produk dan/atau layanan jasa keuangan tertentu; dan
 2. mendorong penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK tertentu, bukan merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
 - c. Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial dapat dianggap sebagai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan apabila kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV dan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.
 - d. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi

Keuangan dilakukan dalam bentuk:

1. Edukasi Keuangan yang antara lain berupa:
 - a. Sosialisasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa sosialisasi, bertujuan untuk menyebarluaskan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh Konsumen dan/atau masyarakat;
 - b. *Workshop*, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *workshop*, dilakukan melalui pelatihan yang memberikan pemahaman dengan menyampaikan materi Edukasi Keuangan secara lebih rinci disertai dengan praktik atas materi yang disampaikan;
 - c. Konsultasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa konsultasi, dilakukan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dengan cara bertukar pikiran untuk mendapatkan informasi, saran dan masukan terkait dengan lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Pelaksanaan konsultasi dimaksud dapat mencakup seluruh materi Edukasi Keuangan dan dilakukan tanpa memungut biaya. Pemberian konsultasi dapat dilakukan kepada individu maupun kelompok masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi, latar belakang dan kebutuhan Konsumen dan/atau masyarakat. Konsultasi yang dilakukan oleh *customer service* atau dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dari suatu PUJK yang merupakan proses bisnis tidak termasuk dalam konsultasi yang dimaksud pada Surat Edaran OJK ini;
 - d. Pendampingan, bentuk Edukasi Keuangan berupa pendampingan kepada konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil dilakukan untuk meningkatkan

keterampilan Konsumen terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Mekanisme pendampingan, yaitu:

- 1) PUJK dapat menentukan Konsumen atau kumpulan Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil yang memerlukan pendampingan;
 - 2) tenaga pendamping yang ditentukan oleh PUJK paling kurang memiliki pengetahuan mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta kemampuan pengelolaan keuangan;
 - 3) tenaga pendamping yang ditentukan PUJK memiliki tugas meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan atau meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Konsumen dalam mengelola keuangan;
 - 4) pendampingan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
 - 5) dalam hal berdasarkan pemantauan PUJK, Konsumen masih memerlukan pendampingan maka PUJK dapat memperpanjang jangka waktu pendampingan; dan
 - 6) PUJK melakukan penilaian kemampuan pengelolaan keuangan Konsumen pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK pada saat penyampaian realisasi kegiatan dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan;
- e. Simulasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa simulasi, dilakukan melalui metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang

- sesungguhnya dalam berinteraksi. Penggunaan kalkulator keuangan merupakan salah satu Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi. Simulasi dapat dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan tetap memperhatikan kondisi dan latar belakang individu peserta yang berbeda-beda;
- f. *Training of Community* (ToC), bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *training of community* (ToC), dilakukan dengan penyediaan *trainer* yang telah diberikan pelatihan oleh PUJK kepada suatu komunitas tertentu untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta lembaga jasa keuangan, serta perubahan perilaku melalui pemantauan dan pendampingan;
 - g. *Outreach Program*, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *outreach program*, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku keuangan komunitas masyarakat yang menjadi target peserta *outreach program*. Kegiatan *outreach program* ini dilakukan dengan memberikan materi Edukasi Keuangan secara berkesinambungan dalam waktu tertentu untuk 1 (satu) program dan pemantauan secara berkala untuk jangka waktu tertentu;
 - h. Kegiatan Lainnya, dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat juga berbentuk pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disertai dengan informasi terkait Edukasi Keuangan.
2. pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang antara

lain berupa:

- a. penyusunan dan pembentukan *database* materi Edukasi Keuangan;
- b. penyediaan sumber daya manusia melalui:
 - i. *Training of Trainer (ToT)*, pelaksanaan ToT merupakan kegiatan bagi calon *trainer* agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas. Pelaksanaan ToT mencakup pula praktik langsung dari materi yang disampaikan;
 - ii. *Training of Facilitator (ToF)*, pelaksanaan ToF merupakan kegiatan bagi calon fasilitator agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas serta mampu memfasilitasi komunitas untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan komunitas dimaksud; dan/atau
 - iii. pembangunan dan/atau pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Edukasi Keuangan dapat berupa *e-learning*, *website*, aplikasi *mobile*, dan/atau kalkulator keuangan.
- e. Metode kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, melalui media tertentu (elektronik, cetak, dan/atau lainnya). Metode yang dilakukan secara langsung (*live*) dilakukan melalui kegiatan tatap muka dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik termasuk pula kegiatan *live* yang menggunakan sarana elektronik dalam menyampaikan materi berbentuk suara atau teks dan

dapat direspon secara langsung.

- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK.
- g. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain.
- h. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain otoritas, PUJK lain, asosiasi PUJK, instansi pemerintah, peneliti, akademisi, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Contoh dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Materi Edukasi Keuangan

- a. Pelaksanaan Edukasi Keuangan dilaksanakan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan.
- b. Materi Edukasi Keuangan disusun dengan memperhatikan strategi literasi di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK.
- c. Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - 1. pengelolaan keuangan materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran Edukasi Keuangan yang meliputi:
 - a. identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan;
 - b. tujuan pengelolaan keuangan;
 - c. tahapan dalam pengelolaan keuangan;
 - d. pencatatan aset/harta yang dimiliki;
 - e. pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan; dan/atau
 - f. perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan,

2. jenis industri jasa keuangan
jenis industri jasa keuangan antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pegadaian,
 3. produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
 - a. manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penghitungan suku bunga/bagi hasil, keuntungan, inflasi, cara diversifikasi risiko;
 - b. hak dan kewajiban konsumen;
 - c. cara mengakses atau memperoleh produk dan layanan jasa keuangan;
 - d. informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - e. mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
 4. perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- d. Seluruh materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disampaikan dalam 1 (satu) kegiatan atau rangkaian kegiatan, kecuali pada kegiatan Edukasi Keuangan berbentuk simulasi dan konsultasi.
 - e. Dalam hal materi Edukasi Keuangan disampaikan dalam 1 (satu) rangkaian kegiatan, maka sasaran Edukasi Keuangantersebut harus merupakan peserta yang sama.
 - f. Tata cara penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disusun dan disesuaikan dengan memperhatikan sasaran dan wilayah pelaksanaan dari kegiatan Edukasi Keuangan.

VIII. TAHAP EVALUASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. PUJK melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik terhadap pelaksanaan kegiatan maupun proses yang terkait kegiatan dimaksud sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 3 huruf b angka 2).

- b. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud padahuruf b memuat:
 - 1. hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 3 huruf b angka 2);
 - 2. perbandingan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebelumnya dengan rencana dan realisasi setiap tahun;
 - 3. pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya; dan
 - 4. kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dimaksud serta mitigasi kendala serupa pada tahun selanjutnya.
 - d. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat mencakup rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - 1. Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. bentuk pelaksanaan;
 - d. metode pelaksanaan;
 - e. materi;
 - f. sasaran dan jumlah peserta;
 - g. jadwal dan wilayah pelaksanaan;
 - h. frekuensi pelaksanaan;
 - i. sumber dan jumlah biaya;
 - j. metode dan sarana pengukuran;

- k. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi;
 - l. hasil pengukuran;
 - m. hasil pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 - n. peran serta pihak lain.
- Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk menyusun laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 3. Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
 4. Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka Romawi VI angka 1.
- b. Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
1. Direksi memastikan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disampaikan kepada OJK.
 2. Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK, laporan realisasi dicantumkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
 3. Pencantuman laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimuat pada bagian tersendiri dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
 4. Laporan realisasi disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
 5. Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana

Bisnis PUJK, laporan realisasi disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.

6. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) jatuh pada hari libur, laporan realisasi tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
7. Laporan realisasi kegiatan, disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
8. Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
9. Dalam hal penyampaian tembusan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 8) mengalami gangguan maka penyampaian laporan dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi Konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah disampaikan sebelum Surat Edaran OJK ini berlaku, tetap mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada

- Konsumen dan/atau Masyarakat.
2. Laporan realisasi atas rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini.

X. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2017

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER BIDANG EDUKASI
DAN PERLINDUNGANKONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO

Salinan ini sesuai dengan aslinyaDirektur Hukum 1

Departemen Hukumttd

Yuliana

uku Referensi: Pendidikan Literasi Keuangan dan Keputusan Investasi pada Pemilik Industri Kecil di Tulungagung

ORIGINALITY REPORT

11 %
SIMILARITY INDEX

12 %
INTERNET SOURCES

1 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%
★ www.basishukum.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%